

LAPORAN KINERJA 2023

BALAI GURU PENGGERAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KINERJA 2023

**BALAI GURU PENGGERAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, BGP Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2023 tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023. BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja. Secara umum, BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.



Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023

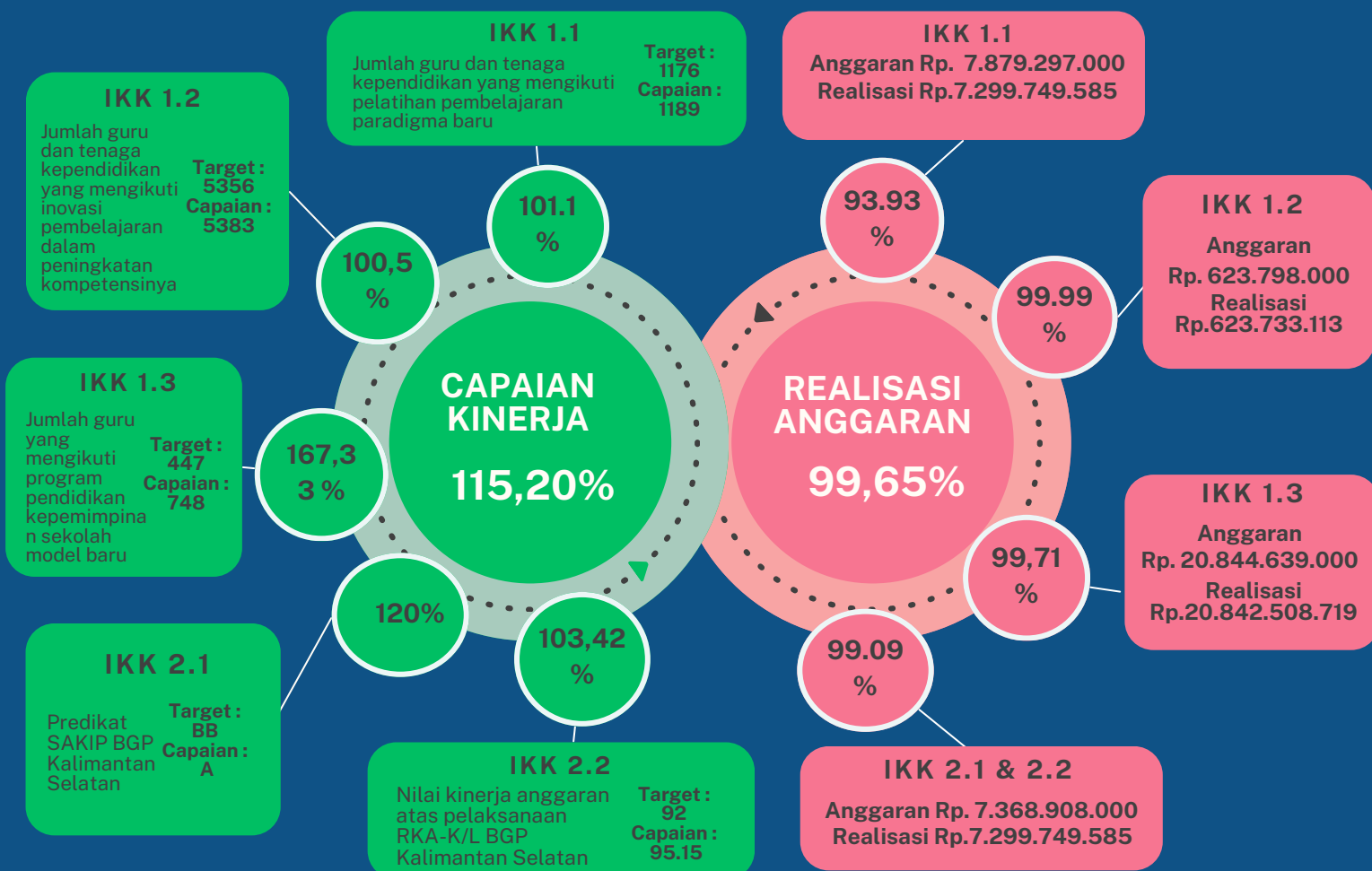


**KEPALA
ABDUL KAMIL MARISI**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Kalimantan Selatan adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a yang pembinaannya dibawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemdikbudristek. BGP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan buah dari revitalisasi BPPAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022. BGP Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan dibantu oleh 54 Pegawai yang terdiri dari 28 orang PNS dan 26 orang PPNPN.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan target kinerja tahun keempat Renstra BGP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2024. Terdapat 2(dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan target kinerjanya pada tahun 2023 dan pencapaiannya disajikan dalam laporan kinerja ini. Ketercapaian sasaran dan indikator lebih detail diuraikan pada bab Akuntabilitas Kinerja dalam laporan ini. Secara umum, capaian kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Nilai efisiensi keseluruhan anggaran adalah sebesar 90,73% dengan kategori “Sangat Efisien”. Kemudian, untuk semua output kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan” masuk dalam kategori “Sangat Efisien” dengan nilai masing-masing output 100%, 99,70%, 100%. Nilai efisiensi semua output kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan” masuk dalam kategori “Kurang Efisien” dengan nilai masing-masing output adalah 53,92%, 52,47%, 51,17%, 50,41%.

Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain :

1. Pada pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), masih terdapat fasilitator yang belum berkomitmen pada moderasi kegiatan.
2. Pada pelaksanaan Program Guru Penggerak (PGP), masih ditemui pengajar praktik yang belum berkomitmen pada moderasi Pendampingan Individu (PI) dan kelompok (lokalakarya). Beberapa fasilitator juga ditemui kurang menguasai substansi materi, kurang mampu menggali informasi (kemampuan berkomunikasi), dan kurang cakap dalam penggunaan IT (LMS);
3. Penerapan metode *at cost* dalam pembayaran transpor peserta/fasilitator/pengajar praktik di beberapa kabupaten/kota terkendala dalam pemenuhan bukti pengeluaran dikarenakan bukti pengeluaran tidak tersedia;
4. Proses pertanggungjawaban keuangan kegiatan belum dapat mengimbangi tingginya volume pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan terlambatnya pencairan dan pembayaran, pelaporan, serta penarikan dana/realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Perbedaan target IKK pada perjanjian kinerja dan target output kegiatan pada DIPA;
6. Mutasi pegawai (widyaprada) sebanyak 16 orang ke BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sedikit banyak mempengaruhi ritme pelaksanaan kegiatan BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain :

1. Kelompok kerja yang bertanggung jawab terhadap PSP melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang hasilnya dianalisis sebagai dasar perbaikan;
2. Kelompok kerja yang bertanggung jawab terhadap PGP melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan yang hasilnya dianalisis sebagai dasar perbaikan;
3. Sosialisasi secara terus menerus terkait aturan keuangan dan pelaku perjadiin diminta komitmen mereka untuk menyiapkan bukti fisik yang diminta;

-
4. Masing-masing kelompok kerja membuat rencana penarikan serta berkomitmen untuk melengkapi dokumen pertanggungjawaban baik keuangan maupun pelaporan tepat waktu dan bagian keuangan membuat Prosedur Standar operasional pencairan keuangan yang harus ditaati bersama.;
 5. Berkonsultasi dengan unit eselon I terkait dengan klaim capaian kinerja dan output;
 6. Penataan SDM yang ada serta optimalisasi SDM dengan berbagi pengetahuan (transfer knowledge) seputar tugas fungsi BGP Kalsel dalam kegiatan rutin.

Langkah kerja kedepan untuk meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas/instansi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja;
2. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan mengidentifikasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi mereka, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan mereka;
3. Meningkatkan inovasi kerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi kerja dan layanan;
4. Melakukan konsultasi secara aktif dan intensif dengan unit eselon I terkait penyelesaian kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun perencanaan program kegiatan yang matang termasuk penyusunan jadwal kegiatan dengan tetap memperhatikan pola penyerapan anggaran ideal;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengagendakan rapat evaluasi rutin setiap 1 minggu di hari Senin;
7. Mengupayakan penambahan pegawai BGP Provinsi Kalimantan Selatan baik melalui usulan formasi CASN maupun melalui jalur mutasi pegawai dari instansi lain;
8. Penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.



DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

01

- Gambaran Umum
- Dasar Hukum
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis dan Peran Strategis

BAB II PERENCANAAN KINERJA

07

- Rencana Strategis
- Rencana Jangka Menengah
- Perjanjian Kinerja
- Alokasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

15

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran
- Inovasi, Penghargaan, *Crosscutting/Collaborative*

BAB IV PENUTUP

63

- Kesimpulan

BAB I

PENDAHULUAN

- Gambaran Umum
- Dasar Hukum
- Tugas Pokok dan Fungsi
- Struktur Organisasi
- Isu Strategis dan Peran Strategis



002

DASAR HUKUM

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak.



TUGAS DAN FUNGSI

TUGAS

Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

FUNGSI

- Pelaksanaan pemetaan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pengembangan model peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan supervisi peningkatan kompetensi guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah;
- Pelaksanaan urusan administrasi.

STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 14 Tahun 2022 Tentang OTK BBGP (Balai Besar Guru Penggerak) dan BGP (Balai Guru Penggerak), struktur organisasi BGP Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:



ISU STRATEGIS DAN PERAN STRATEGIS ORGANISASI

ISU STRATEGIS ORGANISASI

1. Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala;
2. Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4831/ B/HK.03.01/2023 tentang Peran Pengawas Sekolah dalam Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan.

PERAN STRATEGIS ORGANISASI

BGP Provinsi Kalimantan Selatan berperan dalam pelaksanaan pemetaan, pengembangan model, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi, dan kemitraan dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang ada dalam wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- Visi, Misi, dan Tujuan
- Rencana Jangka Menengah
- Perjanjian Kinerja
- Alokasi Anggaran
- Program Prioritas

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Rencana Strategis 2020-2024 BGP Provinsi Kalimantan Selatan disusun berpedoman pada Rencana Strategis 2020-2024 Kemendikbudristek, dengan mempertimbangkan kondisi umum dan aspirasi masyarakat, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing nasional dan mencermati permasalahan-permasalahan yang ada dalam wilayah kerjanya



RENCANA KINERJA JANGKA MENENGAH

Sesuai dengan Renstra 2020-2024, BGP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan target jangka menengah sebagai berikut.

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Base line	Target		
				2022	2023	2024
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan					
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	-	882	1176	2352
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	-	5356	5356	5356
IKK	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	179	357	447	447
SK	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan					
IKK	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	-	-	BB	A
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	-	85	90	92

PERJANJIAN KINERJA

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, BGP Provinsi Kalimantan Selatan merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2023, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut.

PERJANJIAN KINERJA 2023

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	1176
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	5356
IKK	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	447
SK	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan		
IKK	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	BB
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	92

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 38.355.134.000,-
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 6.927.837.000,-
Total		Rp 45.282.971.000,-

PERJANJIAN KINERJA 2023 (REVISI)

Nomen klatur	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Kinerja
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	1176
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	5356
IKK	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	447
SK	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan		
IKK	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	BB
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	92

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 29.347.734.000,-
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 7.469.061.000,-
Total		Rp 36.816.795.000,-

Revisi perjanjian kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan karena adanya perubahan alokasi anggaran yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja dari masing-masing kegiatan yang direncanakan pada tahun 2023.

ALOKASI ANGGARAN 2023

Dalam merealisasikan target kinerja tahun 2023 yang ditetapkan pada perjanjian kinerja, BGP Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan dukungan anggaran dari rupiah murni APBN sebesar Rp.45.282.971.000,-. Selanjutnya, selama tahun 2023, terdapat beberapa kali revisi penambahan dan pengurangan pagu anggaran sebagai bentuk efisiensi dan optimalisasi anggaran, sehingga pada akhir tahun, anggaran yang dikelola oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi Rp. 36.716.642.000,-. Berikut rincian alokasi anggaran BGP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023.

Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Alokasi Anggaran
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp 29.347.734.000,-
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp 7.368.908.000,-
Total		Rp 36.716.642.000,-

PROGRAM PRIORITAS

Sebagai unit pelaksana teknis Kemendikbudristek, BGP Provinsi Kalimantan Selatan membantu pelaksanaan 3 program prioritas nasional, yaitu:



Program Sekolah Penggerak

Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila. Program Sekolah Penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi (literasi dan numerasi) dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru). Program Sekolah Penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi Program Sekolah Penggerak. Peran BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam program ini adalah melaksanakan pendampingan pembelajaran yang dilakukan selama 3 tahun ajaran dan sekolah melanjutkan upaya transformasi secara mandiri.



Program Pendidikan Guru Penggerak

Pendidikan Guru Penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon Guru Penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajarnya sebagai guru. Untuk program ini, BGP Provinsi Kalimantan Selatan membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan di wilayah kerjanya.



Program Implementasi Kurikulum Merdeka

Program Implementasi Kurikulum Merdeka dirancang untuk mendukung peluncuran kurikulum merdeka melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pemangku kepentingan yaitu Dinas Pendidikan termasuk Penilik dan Pengawas, UPT Pusat, organisasi mitra serta Mitra Pembangunan yang bertugas mendampingi satuan PAUD di daerah melaksanakan Kurikulum Merdeka. Sosialisasi Implementasi Kurikulum Merdeka; bertujuan agar pemangku kepentingan tersebut di atas dapat memahami (1) latar belakang, filosofi, dan isi kebijakan penerapan kurikulum merdeka; (2) mengenalkan kebijakan Kurikulum Merdeka; (3) mengenalkan karakteristik Kurikulum Merdeka secara umum; (4) memberikan informasi tentang prosedur pendaftaran Implementasi Kurikulum Merdeka. Bimbingan Teknis Implementasi Kurikulum Merdeka; memiliki tujuan utama memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi Dinas Pendidikan dan UPT (BB/BPMP) dalam mendampingi Satuan PAUD mengimplementasikan Kurikulum Merdeka dan pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) secara mandiri.

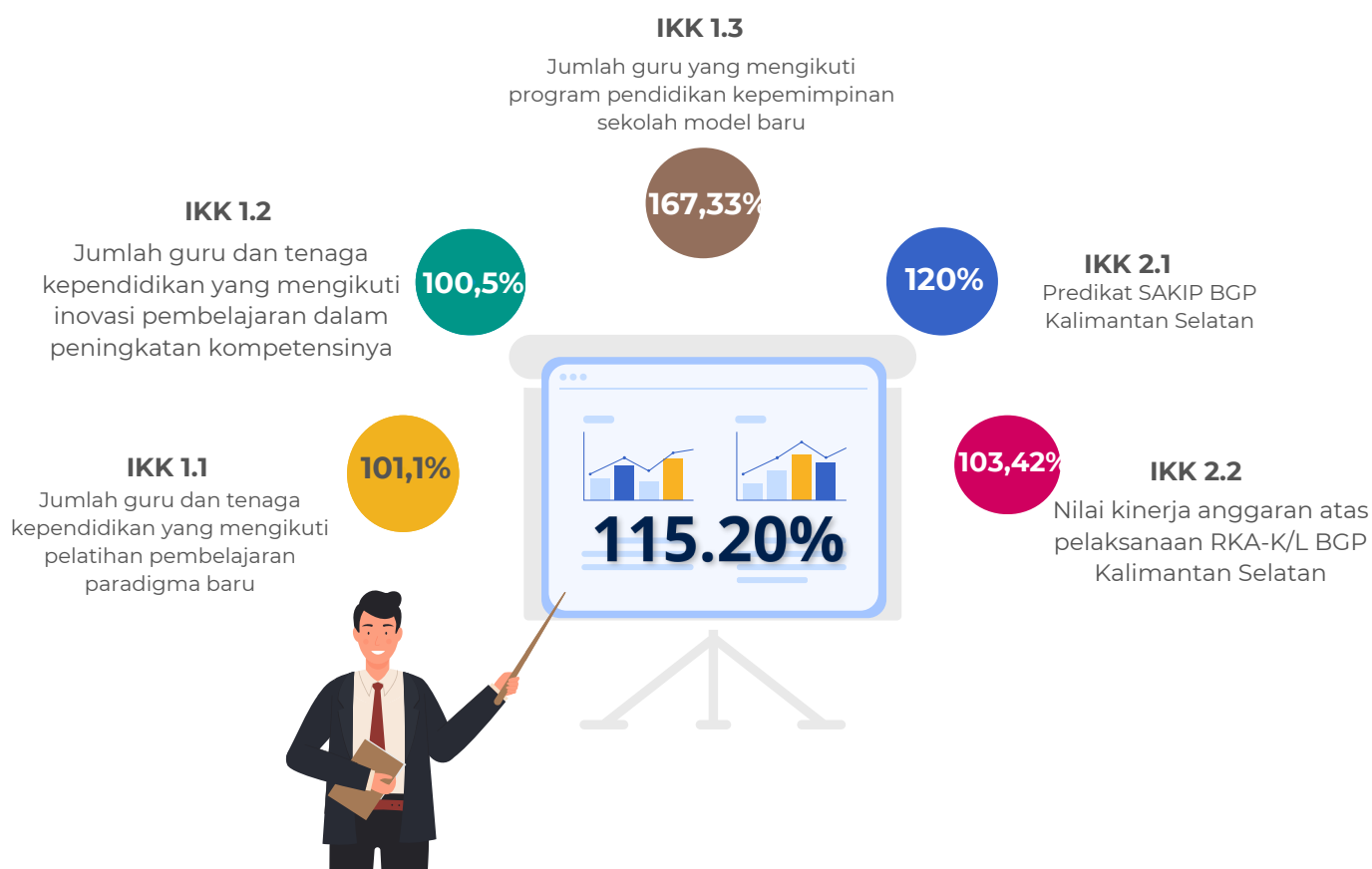
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran
- Efisiensi
- Inovasi, Penghargaan dan Program Crosscutting/Colaborative

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023, BGP Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan dua Sasaran Kegiatan (SK) dengan lima Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) beserta target kinerjanya untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pengukuran capaian perjanjian kinerja dirumuskan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, secara keseluruhan capaian kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 dapat dikatakan berhasil. Seluruh target indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dinyatakan berhasil dicapai dengan tingkat capaiannya sama atau melebihi target yang ditetapkan.



Berikut tabel 3.1 Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Target Kinerja dan Realisasi Kinerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

Nomenklatur	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Capaian Kinerja		
			Target	Realisasi	%
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan				
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	1176	1189	101,10
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	5356	5383	100,50
IKK	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	447	447	167,33
SK	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan				
IKK	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	BB	A	120
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	92	95,15	103,42

SASARAN KEGIATAN 1



MENINGKATNYA KOMPETENSI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

IKK 1.1

101.10%
Dari Target

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru

IKK 1.2

100,50 %
Dari Target

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya

IKK 1.3

167.33%
Dari Target

Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.1

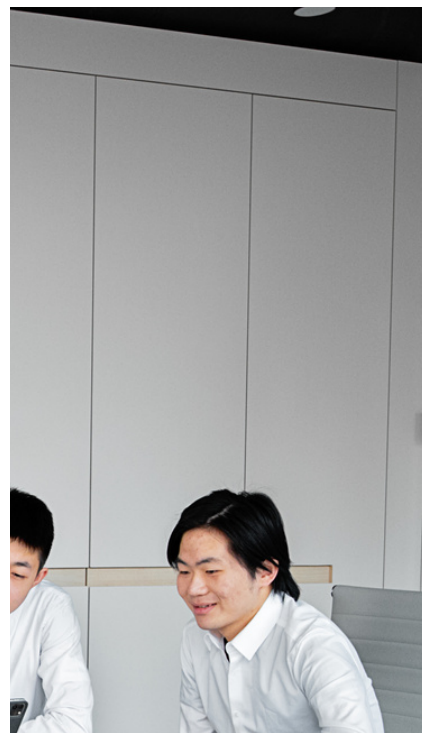
JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG MENGIKUTI PELATIHAN PEMBELAJARAN PARADIGMA BARU

DEFINISI OPERASIONAL

Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran intrakurikuler yang terdiferensiasi dimana konten akan lebih optimal agar siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi sehingga guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Proyek kokurikuler lintas mata pelajaran yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan salah satu bentuk intervensi Program Sekolah Penggerak (PSP).

PSP adalah program peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dengan intervensi menyeluruh baik kepada Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Guru yang merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri/swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi PSP. Kepala sekolah dan guru dari Sekolah Penggerak melakukan pengimbasan kepada satuan pendidikan lain.

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran dengan paradigma baru. Berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan, kriteria guru dan tenaga kependidikan yang diperhitungkan dalam pengukuran indikator kinerja kegiatan ini adalah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Dalam program ini, guru dan tenaga kependidikan yang bernaung pada sekolah penggerak mendapatkan pelatihan dari pelatih ahli, baik dalam tatap muka maupun online, coaching, inhouse training, dan juga lokakarya.



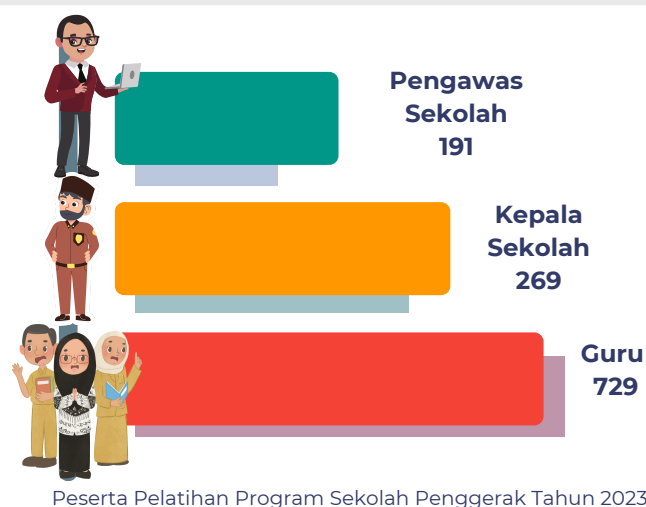
BGP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai UPT Kemendikbudristek yang berperan dalam penyelenggaraan pendampingan kepada kepala sekolah, pengawas sekolah/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak dalam pendampingan pembelajaran. Indikator kinerja kegiatan “Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru” pada BGP Provinsi Kalimantan Selatan ini diukur dengan melihat jumlah kepala sekolah, guru dan pengawas/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak yang mendapatkan pelatihan dari pelatih ahli, baik tatap muka maupun *online*, *coaching*, *inhouse training*, dan juga lokakarya dalam program sekolah penggerak selama 1 tahun pengukuran kinerja.

FORMULA



$$\Sigma G \text{ Mengikuti Pembelajaran Paradigma Baru } = A$$

Rekapitulasi data kepala sekolah, guru, pengawas/penilik satuan pendidikan yang ditetapkan menjadi sekolah penggerak di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan pelatihan program kegiatan sekolah penggerak yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



Kabupaten/Kota	Sekolah Penggerak Angkatan I			Sekolah Penggerak Angkatan II			Sekolah Penggerak Angkatan III			Total
	KS	Guru	PS	KS	Guru	PS	KS	Guru	PS	
Kab. Balangan				14	52	10	7	15	6	88
Kab. Banjar				31	93	26	10	23	10	157
Kab. Barito Kuala							7	16	5	23
Kab. HSS							4	9	3	13
Kab. HST							6	9	5	15
Kab. HSU							8	16	5	24
Kab. Kotabaru	22	55	10	27	77	10	4	8	2	193
Kab. Tabalong							10	22	10	32
Kab. Tanah Bumbu							7	15	5	22
Kab. Tanah Laut				24	68	16	7	15	6	114
Kab. Tapin							6	12	5	18
Kota Banjarbaru	8	16	20	13	43	11	2	4	2	86
Kota Banjarmasin	19	50	16	27	90	13	6	12	6	204
Grand Total	49	121	46	136	423	86	84	176	70	1189

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.2 di atas, diketahui bahwa selama tahun 2023, sebanyak 1189 guru dan tenaga kependidikan satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak di Provinsi Kalimantan Selatan telah mengikuti berbagai macam pelatihan program sekolah penggerak yang diadakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, **capaian untuk IKK 1.1 adalah 1189 orang**. Perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, serta dengan target jangka menengah dapat dilihat pada gambar berikut.

Berdasarkan gambar disamping diketahui bahwa:

- Capaian IKK 1.1 tahun 2023 telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, dari 1168 orang target, dapat direalisasikan 1170 orang;
- Capaian IKK 1.1 tahun 2023 lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 60,7%, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan klaim perhitungan capaian kinerja;
- Capaian IKK 1.1 tahun 2023 telah mencapai 71,34% dari target jangka menengah.



IKK 1.1	2022	2023	Target Renstra
TARGET	883	1176	4411
REALISASI	1958	1189	3147
%CAPAIAN	222	101,1	71,34



Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini adalah adanya kolaborasi/kerja sama yang baik antara BGP Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Pendidikan Kab/Kota dalam pelaksanaan program sekolah penggerak. Selain itu refleksi dan evaluasi yang rutin dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan juga mendukung pencapaian kinerja.

DOKUMENTASI KEGIATAN



BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan program sekolah penggerak yang disusun dan dijadwalkan oleh Ditjen GTK. Kegiatan program sekolah guru penggerak yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung yang telah dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai target kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Teknis Program Sekolah Penggerak Angkatan 1, 2 dan 3;
- Koordinasi Program Sekolah Penggerak dan Pengawasan Tes PPPK Guru;
- Penyelenggaraan Program Penguatan Literasi Dalam Pembelajaran di SD dan SMP
- Kegiatan Penanda Tangan Perjanjian Kerjasama Fasilitator Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 dan 2 Tahun 2023;
- Studi Tiru Optimallisasi Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak;
- Orientasi Pendampingan PSP;
- Lokakarya Kurikulum KS-Guru;
- Lokakarya Kurikulum KS-PS;
- Kunjungan Lapangan dan Refleksi SP;
- Forum Pemangku Kepentingan;
- Forum PMO Sekolah;
- Refleksi Akhir Tahun Ajaran;
- Pelatihan Komite Pembelajaran KS dan Guru;
- Pelatihan Komite Pembelajaran PS dan BK;
- Bimbingan Teknis Persiapan Pelatihan Komite Pembelajaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 3;
- Kegiatan Upgrading Komunitas Belajar Pada Sekolah Penggerak;
- Kegiatan Boothcamp Sekolah Piloting;
- Loka Pengembangan Program Inovasi;
- Refleksi Komunitas Belajar Ramah Guru Bagi Sekolah Pilotting.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Masih terdapat fasilitator yang kurang komitmen terhadap moderasi/panduan kegiatan;
- Perubahan pola PMO sekolah untuk angkatan 1 dan 2 tidak lagi didampingi oleh FSP;
- Perubahan waktu kegiatan lokakarya karena menyesuaikan kegiatan di daerah/dinas pendidikan kab/kota sebagai tempat kegiatan;
- Pengaturan waktu pendampingan oleh fasilitator karena padatnya agenda di masing masing FSP;
- Terdapat rotasi kepala sekolah di satuan pendidikan yang tidak sesuai ketentuan;
- Kurangnya jumlah pengawas sekolah penggerak di beberapa kabupaten/kota dikarenakan pensiun/sakit/meninggal dunia;
- Pengawas sekolah tidak hadir pada saat pendampingan daring karena faktor jaringan, cuaca (hujan) dan sakit (laporan dari FSP).

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi sebagai berikut:

- Melakukan monitoring dan evaluasi fasilitator dan pelaksanaan program sekolah penggerak di satuan pendidikan;
- Aktif melakukan koordinasi dengan dinas/instansi daerah terkait dengan penetapan waktu kegiatan agar kegiatan PSP dapat berjalan sebagaimana mestinya;
- Mengingatkan FSP terkait komitmen mereka sebagai fasilitator dalam mengutamakan pendampingan sekolah yang mereka ampu;
- Menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar tidak merotasi kepala sekolah, guru, dan SDM lainnya selama minimal empat tahun (khusus untuk sekolah negeri) di Sekolah Penggerak.





INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.2

JUMLAH GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN YANG INOVASI PEMBELAJARAN DALAM PENINGKATAN KOMPETENSINYA

DEFINISI OPERASIONAL

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan inovasi pembelajaran dalam pengembangan profesinya.

Salah satu bentuk inovasi dalam pembelajaran adalah dengan memanfaatkan platform teknologi yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri yang bisa disesuaikan dengan kondisinya kapan pun dan di mana pun dalam mengembangkan kompetensinya. Mendorong pendidik saling belajar dalam ruang kolaborasi dan komunitas belajar (Learning Community) dengan guru yang lain dalam hal berbagi pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan (Social Constructivism).

Program Guru Belajar dan Berbagi merupakan salah satu contoh platform teknologi yang dirancang untuk membantu guru dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dengan tetap memberikan pembekalan dasar yang bermakna bagi peserta didik untuk melakukan merdeka belajar, yang terdiri dari: (1) Seri asesmen kompetensi minimum; (2) Seri literasi dan numerasi; (3) Seri pendidikan keterampilan hidup; (4) Seri belajar mandiri calon guru ASN PPPK; (5) Seri pendidikan inklusif; dan (6) Seri masa pandemi Covid-19; dan lain sebagainya. Sasaran program Guru Belajar dan Berbagi adalah guru dan tenaga kependidikan yang memiliki akun SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen untuk Pengembangan Keprofesian yang Berkelanjutan).

FORMULA



$$\Sigma \text{GTK}^{\text{Kompetensi}} = A$$

Pengukuran capaian kinerja IKK 1.2 dilakukan dengan menghitung jumlah guru dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti inovasi pembelajaran dalam meningkatkan kompetensinya selama dalam 1 tahun kinerja. Perhitungan jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam meningkatkan kompetensinya yang dilakukan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan adalah dengan menghitung jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum kinerja yang difasilitasi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan, baik yang didanai melalui DIPA BGP Provinsi Kalimantan Selatan ataupun dana kemitraan dengan dinas/instansi daerah selama tahun 2023. Untuk data guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan platform teknologi merdeka mengajar yang bertujuan membantu pendidik dalam mengimplementasikan pembelajaran mandiri tidak diperhitungkan karena data yang didapat tidak memadai sehingga belum dapat diyakini untuk diklaim capaiannya. Berikut rekapitulasi jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum merdeka dalam rangka peningkatan kompetensinya di lingkungan BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 3.5

Rekapitulasi Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Inovasi Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Merdeka

Tahun 2023

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
1	Bimtek Komunitas Belajar Dalam Sekolah Ramah Guru Angkatan 1	11 s.d 13 Mei 2023	118
2	Bimtek Komunitas Belajar Dalam Sekolah Ramah Guru Angkatan 2	15 s.d 17 Mei 2023	112
3	Bimtek Komunitas Belajar Dalam Sekolah Ramah Guru Angkatan 3	4 s.d 6 Juni 2023	108
4	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Literasi Dan Numerasi Bagi Guru SD Dan SMP A1	1 s.d 5 Agustus 2023	75
5	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Literasi Dan Numerasi Bagi Guru SD Dan SMP A2	14 s.d 18 Agustus 2023	75
6	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angkatan 1	15-17 Juni 2023	123
7	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angkatan 2	19-21 Juni 2023	123
8	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angkatan 3	22-24 Juni 2023	123
9	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angkatan 4	25-27 Juni 2023	123
10	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Angkatan 5	3-5 Juli 2023	122

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
11	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Optimalisasi Komunitas Belajar Ramah Guru dalam Sekolah) Angkatan 6	6-8 Juli 2023	122
12	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Optimalisasi Komunitas Belajar Ramah Guru dalam Sekolah) Angkatan 7	10-12 Juli 2023	107
13	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik Angkatan 1	4 s.d 7 November 2023	90
14	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik Angkatan 2	11 s.d 14 November 2023	150
15	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik Angkatan 3	23 s.d 26 Nov 2023	90
16	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Pendampingan dan Kepemimpinan Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka	17 s.d 20 Desember 2023	82
17	Upgrading Kinerja Program Sekolah Penggerak	19 s.d 21 Desember 2023	21
18	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Pendampingan dan Kepemimpinan Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka	20 s.d 22 Desember 2023	159
19	Peningkatan Kompetensi Pengawas dan Kepala Sekolah dalam Pendampingan dan Kepemimpinan Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka	26 s.d 29 Desember 2023	80
20	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	09 Agustus 2023	47
21	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	1 sd. 2 Agustus 2023	70
22	Workshop IKM. SMAN 1 Kintap	3 Agustus 2023	71
23	Workshop Penguatan IKM Bagi Kepala Madrasah dan Guru MTs Al-Fallah Puteri	8 s.d 10 Agustus 2023	28
24	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	10 Agustus 2023	5
25	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	9 s.d 10 Agustus 2023	32
26	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	30 s.d 31 Agustus	61
27	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	31 Juli 2023	27
28	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	10 Agustus 2023	112
29	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	18 Agustus 2023	14
30	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	07-Sep-23	58
31	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	18 s.d 19 September 2023	24
32	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	30-Sep-23	18
33	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	14 s.d 15 Oktober 2023	25
34	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	18 Oktober 2023	35
35	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	20 s.d 21 Oktober 2023	34
36	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	22 s.d 23 Oktober 2023	15
37	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	24 s.d 25 Oktober 2023	52
38	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	7 s.d 8 November 2023	140
39	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	20 s.d 21 Nov 2023	65
40	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	22-Nov-23	25
41	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	20 Desember 2023	25
42	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	18 s.d 19 Desember 2023	57

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	JUMLAH PESERTA
43	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	12 Desember 2023	10
44	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	8 s.d 9 Desember 2023	50
45	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	6 s.d 7 Desember 2023	49
46	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	4 Desember 2023	53
47	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	20 s.d 25 November 2023	700
48	Peningkatan Kompetensi Bagi Pendidikan PAUD dan SMP Kotabaru	15 s.d 26 Oktober 2023	250
49	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	11-Nov-23	90
50	Pelatihan TOT Literasi Numerasi bagi guru	01-Nov-23	54
51	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	15-Nov-23	203
52	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	09 Agustus 2023	60
53	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	13-Nov-23	90
54	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	28-Nov-23	140
55	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	18-Nov-23	60
56	Penguatan IKM bagi Pengawas/Penilik untuk peningkatan kompetensi tenaga kependidikan	24 Sept- 14 Okt 2023	257
57	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	25 Oktober 2023	50
58	Bimtek peningkatan wawasan GP	06-Nov-23	50
59	Pendampingan peningkatan kompetensi guru dalam IKM	5 Desember 2023	74
60	Workshop pendidikan bagi guru dan tenaga kependidikan	12 Desember 2023	100
Total			5383

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 3.2 diatas, diketahui bahwa selama tahun 2023, sebanyak 5383 guru dan tenaga kependidikan telah mengikuti berbagai macam bentuk pendidikan dan pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang diadakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, **capaian untuk IKK 1.2 adalah 5383 orang.**

Berdasarkan gambar Perbandingan antara target dan capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, serta target jangka menengah disamping diketahui bahwa:

- Capaian IKK 1.2 tahun 2023 telah berhasil memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan, dari 5356 orang target, dapat direalisasikan 5383 orang;
- Capaian IKK 1.2 tahun 2023 lebih rendah dari tahun (2022) sebelumnya sebesar 25,4%, hal ini dikarenakan terdapat perbedaan klaim perhitungan capaian kinerja;
- Capaian IKK 1.2 tahun 2023 telah mencapai 78,41% dari target jangka menengah.



IKK 1.1	2022	2023	Target Renstra
TARGET	5356	5356	16068
REALISASI	7217	5383	12600
%CAPAIAN	222	100,05	78,41



Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini adalah tim kerja BGP Provinsi Kalimantan Selatan aktif bekerjasama dengan mitra dari pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan di wilayah kerja. BGP Provinsi Kalimantan Selatan juga selalu melakukan monitoring dan evaluasi hasil satuan pendidikan/peserta diklat setelah kegiatan peningkatan kompetensi selesai.

BGP Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya bisa mengidentifikasi data capaian indikator kinerja ini. hal ini dikarenakan selain terkendala data yang bisa dikumpulkan belum terorganisasi dengan baik, terutama untuk kategori guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan PMM dalam peningkatan kompetensi mereka. Kedepannya, BGP Provinsi Kalimantan Selatan perlu melakukan konsultasi dan koordinasi kepada unit eselon 1 terkait data guru dan tenaga kependidikan yang mengakses PMM untuk peningkatan kompetensi mereka. Selanjutnya, BGP Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu mengoptimalkan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang masih perlu pendampingan dalam inovasi pembelajaran implementasi kurikulum merdeka sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan capaian kinerja ini.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Adapun kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan inovasi pembelajaran dan implementasi kurikulum merdeka belajar selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Pembekalan Penyusunan Program Komunitas Belajar Penggerak Komunitas Kab/kota;
- Pembekalan dan kurasi NS BPB;
- Peningkatan Kapasitas Penggerak Komunitas Belajar per 3 bulan;
- Peningkatan Kapasitas Berbagi Praktik Baik oleh Penggerak Komunitas di kab/kota;
- Workshop IKM Merdeka Belajar Sebagai Strategi Pengembangan Keterampilan Berpikir Kritis dan Kesenjangan Dalam Pendidikan;
- Pekan Bukti Karya Komunitas Belajar;
- Supervisi dan Evaluasi Peningkatan Kompetensi Guru;
- Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Pengawas Sekolah/ Penilik Untuk Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan;
- Penguatan Implementasi Kurikulum Merdeka Bagi Kepala Sekolah;
- Peningkatan Kompetensi Profesional Guru dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Literasi dan Numerasi Peserta Didik di Kab/ Kota;
- *Training On Trainer* (TOT) Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Literasi dan Numerasi;
- Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah dalam implementasi kurikulum Merdeka;
- Pelatihan Matematika Bagi Guru Kabupaten Kotabaru.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan program sekolah penggerak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Sebagian guru masih kurang optimal dalam pemanfaatan PMM;
- Sebagian guru yang sudah mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM belum menyelesaikan aksi nyata;
- Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kurikulum melalui jalur mandiri diperlukan monitoring dan evaluasi, tetapi masih belum terlaksana karena terkendala anggaran.
- Selain itu, terkait dengan pengukuran kinerja pada indikator ini adalah sulitnya memvalidasi data guru dan tenaga kependidikan yang memanfaatkan platform merdeka mengajar dalam inovasi pembelajaran di tahun kinerja yang diukur.

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi, BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi sebagai berikut:

- Menyampaikan kepada pimpinan terkait dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- Melanjutkan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri dengan menggunakan PMM.
- Menyediakan video-video rekaman kegiatan sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan PMM pada media sosial Youtube.





INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1.3

JUMLAH GURU YANG MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KEPEMIMPINAN SEKOLAH MODEL BARU

DEFINISI OPERASIONAL

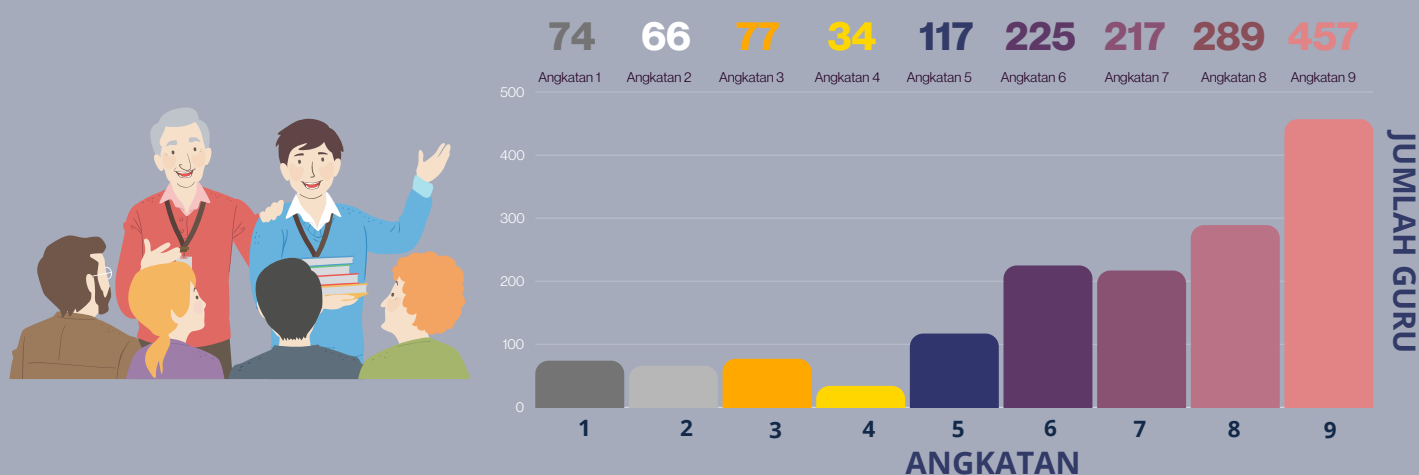
Program pendidikan kepemimpinan sekolah baru adalah program pendidikan guru penggerak, yaitu program pendidikan kepemimpinan bagi guru penggerak untuk menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar pancasila. Dengan kata lain program pendidikan guru penggerak adalah program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Program guru penggerak bertujuan untuk menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya agar menjadi guru penggerak/pendamping bagi rekan pengajar lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Program ini meliputi pelatihan daring, lokakarya, konferensi, dan pendampingan selama 6 bulan bagi calon guru penggerak. Selama program, guru tetap menjalankan tugas mengajar sebagai guru.

FORMULA

$$\Sigma G \text{ Mengikuti PGP} = A$$

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru adalah banyaknya guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti program guru penggerak. Berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan, kriteria guru yang diperhitungkan dalam pengukuran indikator kinerja kegiatan ini adalah guru yang mengikuti pelatihan program guru penggerak dalam 1 tahun kinerja yang diukur.

Pada tahun 2023, BGP Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan program pendidikan guru penggerak sebanyak 4 angkatan pendidikan, yaitu angkatan 6, 7, 8 dan 9. Angkatan 6 dan 7 merupakan lanjutan dari pendidikan guru penggerak di tahun 2022. Grafik berikut menunjukkan perkembangan jumlah calon guru penggerak per angkatan di Provinsi Kalimantan Selatan dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 9 yang dimulai sejak tahun 2020.



Jumlah guru yang dapat diperhitungkan menjadi capaian tahun 2023 adalah sebanyak 748 orang. Jumlah ini didapat dari perhitungan jumlah guru penggerak angkatan 8 yang telah selesai mengikuti program pendidikan guru penggerak dan jumlah guru calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9. Hal ini dikarenakan untuk angkatan 6 dan 7 sudah diperhitungkan sebagai capaian di tahun 2022. Dengan demikian, **capaian untuk IKK 1.3. ini adalah 748 orang**, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 167,3% dari target 447 orang yang ditetapkan. Adapun, rekapitulasi data guru yang mengikuti pendidikan guru penggerak per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Kabupaten/Kota	Angkatan Program Pendidikan Guru Penggerak									Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Kabupaten Balangan				15					57	72
Kabupaten Banjar		13				46			65	124
Kabupaten Barito Kuala			11			47		41	17	116
Kabupaten Hulu Sungai Tengah		9		1	23			43	58	134
Kabupaten Hulu Sungai Selatan			8			41		23		72
Kabupaten Hulu Sungai Utara			18				23	46	28	115
Kabupaten Kotabaru							45		37	82
Kabupaten Tabalong	30			18			46	25	18	137
Kabupaten Tanah Bumbu					25				44	69
Kabupaten Tanah Laut	44					56		41		141
Kabupaten Tapin							18		18	36
Kota Banjarbaru			40			35	12	49	17	153
Kota Banjarmasin		44			69		73	21	98	305
JUMLAH	74	66	77	34	117	225	217	289	457	1556

Berdasarkan gambar perbandingan antara target dan capaian kinerja IKK 1.3 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dan target jangka menengah (renstra) disamping diketahui bahwa:

- Capaian IKK 1.3 tahun 2023 telah berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dari target 447 orang berhasil dicapai 748 orang dengan tingkat capaian 167,3%
- Capaian IKK 1.3 tahun 2023 lebih tinggi sebesar 25,7% dari capaian tahun 2022 (sebelumnya);
- Capaian IKK 1.3 tahun 2023 telah mencapai 107,35% dari target jangka menengah (kumulatif), dari target 1251 orang telah dicapai 1343 orang.



IKK 1.3	2022	2023	Target Renstra
TARGET	357	447	1251
REALISASI	595	748	1343
%CAPAIAN	166	167,3	107,3



Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini adalah di tahun 2023, BGP Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Pendidikan Kab/Kota gencar melakukan sosialisasi dan coaching clinic pendaftaran Program Pendidikan Guru Penggerak kepada guru-guru yang dinilai potensial mengikuti program ini. Selain itu, dengan mulai diterapkannya Peraturan terkait dengan persyaratan kepala sekolah harus dari guru penggerak, memberikan motivasi guru untuk mengikuti program pendidikan guru penggerak

Akan tetapi, walaupun capaian atas IKK 1.3 ini telah melampaui target kumulatif jangka menengah (renstra), BGP Provinsi Kalimantan Selatan harus tetap menyusun langkah dan strategi terhadap pencapaian target IKK 1.3 tahun 2024, dikarenakan pencapaian target 2024 tetap menjadi suatu tantangan bagi BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari hasil observasi dan wawancara langsung dari warga satuan pendidikan (non data), menunjukkan bahwa hasil positif atas pelaksanaan program pendidikan guru penggerak ini sudah dapat dirasakan secara nyata di lingkungan satuan pendidikan, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan budaya positif. Walaupun demikian, kedepannya BGP Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan tetap dapat mengembangkan inovasi kerja untuk mencapai keberhasilan yang maksimal atas program pendidikan guru penggerak, yang tidak hanya pada level capaian *output* tetapi juga *outcome* yang ditetapkan di level kementerian. BGP Provinsi Kalimantan Selatan juga perlu meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas pelaksanaan pendidikan guru penggerak dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi daerah terkait. Terakhir, untuk tahun depan, dengan adanya program guru penggerak mandiri yang dilaksanakan oleh instansi daerah juga perlu mendapatkan perhatian agar keberlangsungan dan kelancaran program pendidikan ini dapat berjalan dengan baik.

DOKUMENTASI KEGIATAN



BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan seluruh kegiatan program pendidikan guru penggerak yang disusun dan dijadwalkan oleh Dirjen GTK. Kegiatan program pendidikan guru penggerak yang mendukung baik langsung maupun tidak langsung yang telah dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam mencapai target kinerja indikator ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Koordinasi Teknis Program Guru Penggerak Angkatan 8 dan 9;
- Rapat Koordinasi Kelulusan CGP;
- Sosialisasi dan Publikasi Program Pendidikan Guru Penggerak;
- Rapat Koordinasi Pleno Kelulusan Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8;
- Rapat Koordinasi *Plotting* CGP-PP;
- Kegiatan Penguatan Kapasitas Guru Penggerak Se Provinsi Kalimantan Selatan;
- Sosialisasi Sistem Pengangkatan Kepala Sekolah dan Permendikbud Tentang PKB;
- *Coaching Clinic* Seleksi Pendaftaran Program Guru Penggerak;
- Studi Tiru Optimalisasi Pelaksanaan Program Pendidikan Guru Penggerak;
- Pelatihan Modul Calon Guru Penggerak (CGP);
- Pendampingan Individu;
- Pendampingan Kelompok;
- Pengenalan LMS bagi CGP;
- Pelaksanaan Lokakarya Perdana;
- Penyegaran Modul 2 dan 3 Bagi Pengajar Praktik Angkatan 9;
- Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PPG Provinsi Kalimantan Selatan;
- Monev Penjaminan Kegiatan.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan guru penggerak selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Beberapa pengajar praktik dalam melaksanakan pendampingan individu dan lokakarya tidak sesuai dengan moderasi/panduan;
- Beberapa fasilitator kurang menguasai substansi materi dan kompetensi bidang IT;
- Di beberapa daerah di kab/kota pengajar praktik mengalami kesulitan dalam melampirkan bukti pengeluaran riil perjalanan dinas, dikarenakan kondisi tertentu seperti daerah terpencil dimana bukti tidak tersedia;
- Beberapa fasilitator dan pengajar praktik tidak segera melakukan pengisian nilai pada LMS setelah tugas/kegiatan selesai dilaksanakan.

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi sebagai berikut:

- Penanggungjawab PGP melakukan evaluasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin;
- Memberikan imbauan dan penegasan terhadap pengajar praktik yang belum melaksanakan Pendampingan Individu (PI) dan lokakarya sesuai moderasi;
- Penanggungjawab PGP memberikan motivasi terhadap fasilitator agar meningkatkan kompetensi baik penguasaan substansi materi maupun bidang IT. Karena penguasaan LMS berpengaruh pada time spent fasilitator;
- Melampirkan Surat Pertanggungjawabn Mutlak (SPTJM) sebagai bukti untuk pembayaran;
- Penanggungjawab PGP memberikan imbauan (batas waktu) terhadap fasilitator dan pengajar praktik agar segera mengisi penilaian di LMS tepat waktu;
- *Upgrading/refreshment* pengajar praktik dan Fasilitator



SASARAN KEGIATAN 2



MENINGKATNYA TATA KELOLA BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

REALISASI INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023

IKK 2.1

120%
Dari Target

**Predikat SAKIP BGP
Kalimantan Selatan**

IKK 2.2

103,42 %
Dari Target

**Nilai kinerja anggaran
atas pelaksanaan RKA-
K/L BGP Kalimantan
Selatan**



INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.1

PREDIKAT SAKIP BGP KALIMANTAN SELATAN

DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan Perpres 29 th 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Evaluasi SAKIP ini dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan. Tingkat penilaian hasil evaluasi SAKIP ada tujuh (7) predikat. Predikat AA (>90-100) sangat memuaskan; Predikat A (>80-90) memuaskan; Predikat BB (>70-80) sangat baik; Predikat B (>60-70) baik; Predikat CC (>50-60) cukup; Predikat C (>30-50) kurang; dan Predikat D (>0-30) sangat kurang.

Pengukuran indikator kinerja kegiatan “Predikat SAKIP BGP Provinsi Kalimantan Selatan” dengan melihat Lembar Hasil Evaluasi (LHE) atas implementasi SAKIP yang diterima oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk tahun kinerja yang diukur. berikut merupakan hasil cuplikan LHE BGP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.



**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30%	26.1
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24.6
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20
Nilai Akuntabilitas Kinerja		A	82.70

PERENCANAAN

No	Catatan
0	Renstra telah dilakukan reviu namun belum dilakukan reviu secara berkala

PENGUKURAN

No	Catatan
0	Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja telah dilakukan, namun belum dilakukan secara berkala

PELAPORAN

No	Catatan
0	Capain Kierja belum menyampaikan informasi efisiensi atas pengukuran sumber daya dalam mencapai kinerja

EVALUASI

No	Catatan
0	Evaluasi AKIP tahun 2022 tidak dilakukan karena ada perubahan nomenkelatur organisasi

PERENCANAAN

No	Rekomendasi
0	Renstra agar direviu secara berkala untuk memastikan keselarasan rumusan tujuan/basaran/indikator dengan tugas dan fungsi unit kerja, untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dari target akhir Renstra

PENGUKURAN

No	Rekomendasi
0	Pengukuran atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja agar dilakukan secara berkala (Triwulan)

PELAPORAN

No	Rekomendasi
0	Agar dalam laporan kinerja Bab 3 menyampaikan informasi efisiensi atas pengukuran sumber daya dalam mencapai kinerja

Jakarta, 11 Desember 2023



Sutoyo

FORMULA

Lembar Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP dari Inspektorat Jenderal
Kemendikbudristek

Pada tahun 2023, berdasarkan LHE SAKIP tahun 2023 yang diterima, BGP Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh nilai akuntabilitas kinerja 82,70 dengan predikat A. Dengan demikian, **capaian indikator kinerja ini adalah predikat A.**

Berdasarkan gambar perbandingan antara target dan capaian kinerja IKK 2.1 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dan target jangka menengah (renstra) disamping diketahui bahwa:

- Capaian IKK 2.1 tahun 2023 telah berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, dari target predikat BB berhasil dicapai predikat A dengan tingkat capaian 120%
- Capaian IKK 2.1 tahun 2023 lebih tinggi tidak diperbandingkan dengan capaian tahun 2022 (sebelumnya), karena di tahun 2022 tidak dilakukan evaluasi;
- Capaian IKK 2.1 tahun 2023 telah mencapai 100% dari target jangka menengah, yaitu predikat A.



IKK 1.1	2022	2023	Target Renstra
TARGET	-	BB	A
REALISASI	-	A	A
%CAPAIAN	-	120	100



Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini adalah di tahun 2023, besarnya andil pimpinan dalam memimpin perubahan organisasi untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, BGP Provinsi Kalimantan Selatan juga dalam penguatan implementasi SAKIP menugaskan SDMnya untuk mengikuti berbagai diklat SAKIP dalam peningkatan kompetensi.

Pencapaian atas indikator kinerja kegiatan ini yang telah berhasil mencapai target jangka menengah, tetap masih harus ditingkatkan lagi dengan menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2023 dan membenahi aspek akuntabilitas yang masih perlu diperbaiki, agar nilai akuntabilitas kinerja bisa terus ditingkatkan. Mengingat, nilai AKIP ini juga dapat dijadikan indikator kualitas pelaksanaan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BGP Provinsi Kalimantan Selatan kepada masyarakat.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan-kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- Reviu atas renstra 2020-2024;
- Rapat berkala pengukuran kinerja dan evaluasi capaian anggaran dan kinerja setiap triwulan;
- Menindaklanjuti rekomendasi pimpinan atas hasil evaluasi kinerja;
- Tim SAKIP mengikuti pendampingan pengisian LHE Mandiri yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemdikbudristek;
- Penyusunan POS Pengukuran Kinerja, dan POS Penyusunan Laporan Kinerja;
- Tim SAKIP aktif berkoordinasi, konsultasi dan sharing baik dengan unit eselon I dan BBGP/BGP lainnya;
- Peningkatan kompetensi SDM SAKIP dengan cara penugasan SDM untuk mengikuti berbagai sosialisasi dan diklat SAKIP yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Kemendikbudristek;
- Pembenahan dokumentasi implementasi SAKIP;
- Pembenahan data pengukuran kinerja dan mulai merancang pembuatan database kinerja;
- Studi tiru implementasi SAKIP pada BGP Provinsi Bali.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan implementasi sistem akuntabilitas kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Adanya perbedaan penetapan target indikator kinerja kegiatan pada perjanjian kinerja yang (berbasis *output*) dengan target output yang ada pada dokumen anggaran, sehingga membuat kebingungan pada saat penetapan capaian perjanjian kinerja dan capaian output;
- Penetapan target IKK perjanjian kinerja yang tidak ditetapkan dengan tidak mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan hanya diberikan langsung oleh unit eselon I;
- Beberapa kegiatan akuntabilitas kinerja seperti rapat pertanggungjawaban/pelaksanaan program dan anggaran tidak/belum terdokumentasikan dengan baik;
- Data kinerja belum terorganisasi dengan baik.

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi sebagai berikut:

- Berkonsultasi aktif dengan unit eselon I terkait dengan klaim capaian kinerja dan output;
- Mulai mengidentifikasi kegiatan-kegiatan akuntabilitas kinerja dan menyusun prosedur operasional dokumentasi kegiatan pertanggungjawaban kinerja;
- Mulai membuat *database* kinerja.





INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2.2

NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L BGP KALIMANTAN SELATAN

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai yang berkaitan dengan prestasi kerja pelaksanaan anggaran kerja, capaian keluaran (*output*) dari kegiatan, dan hasil (*outcome*) dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. NKA dihitung sebagai komposit capaian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) dengan bobot masing-masing sesuai perhitungan unsur kualitas anggaran Pemerintah Pusat (kementerian/lembaga) yaitu EKA 60 persen dan IKPA 40 persen.

Sebagai fungsi akuntabilitas, EKA bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran. Sebagai fungsi peningkatan kualitas, EKA bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L dalam rangka peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan. EKA dilakukan atas tiga aspek yaitu aspek implementasi, manfaat, dan konteks yang menghasilkan informasi kinerja yang berbeda-beda. EKA pada tingkat satuan kerja, terdiri dari 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian Keluaran, Konsistensi, Penyerapan Anggaran, dan Efisiensi.

Nilai EKA Satuan kerja kementerian/lembaga merupakan hasil perhitungan atas nilai setiap indikator sesuai dengan bobot masing-masing indikator aspek implementasi. Bobot nilai kinerja untuk setiap indikator EKA adalah sebagai berikut: Capaian RO (43,5%), Penyerapan Anggaran (9,7%), Nilai Efisiensi (28,6%), Konsistensi (18,2%).

IKPA merupakan instrumen monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sesuai dengan PMK PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. IKPA yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Terdapat 8 indikator dan bobot penilaian yang ditetapkan atas keempat aspek tersebut, yaitu: Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Pengelolaan UP dan TUP(10%), Penyampaian Data Kontrak(10%), Penyelesaian Tagihan(10%), Penyerapan Anggaran(20%), Dispensasi SPM (5%), dan Capaian Output (25%).

FORMULA


$$\text{NKA} = 60\% \text{ EKA} + 40\% \text{ IKPA}$$

Penyediaan Informasi nilai EKA dapat diperoleh melalui SMART (<https://smart.kemenkeu.go.id>) dan Nilai IKPA dari OMSPAN (<https://spanint.kemenkeu.go.id>), dan Nilai NKA yang dirangkum dalam SPASIKITA.Kemendikbudristek.go.id pada akhir tahun anggaran.


$$\text{EKA} (60\% \times 97,29) + \text{IKPA} (40\% \times 91,95) = 95,15$$



<https://monev.kemenkeu.go.id/>

EKA 97.29

MONEVPA

Rebutan

BGP PROV.
T.A. 2023

Excel

PDF

20/11/2023

Pelaksanaan Anggaran

SAMPAI DENGAN 1 DESEMBER

20/11/2023

KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PENCAPAIAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN			KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	TO
				REVISI DIPA	DEWAKI PALMARIAN RI DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	SELANG KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TADJARAN	PENGOLONGAN LP DAN TUP	DIPENGAKSI DPM	CAPAIAN OUTPUT			
023	450004	BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nilai	100.00	80.70	83.08	92.52	100.00	80.08	100.00	100.00	91.95	100%	
			Bobot	10	10	20	10	10	5	25				
			Nilai Akhir	10.00	8.07	16.62	9.25	10.00	4.01	5.00	25.00			
			Nilai Angket	90.35			91.54			100.00				

<https://spanint.kemenkeu.go.id>

IKPA 91,95

Berdasarkan dari data yang diambil diketahui bahwa Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah 95,15. Dengan demikian, **capaian kinerja untuk IKK 2.2 ini adalah nilai 95,15.**

Berdasarkan gambar perbandingan antara target dan capaian kinerja IKK 2.2 tahun 2023 dengan tahun sebelumnya, dan target jangka menengah (renstra) di samping diketahui bahwa:

- Capaian IKK 2.2 tahun 2023 telah berhasil melampaui target yang ditetapkan, dari target nilai 92 berhasil dicapai nilai 95,15 dengan tingkat capaian 103,42%
- Capaian IKK 2.2 tahun 2023 lebih tinggi dari capaian tahun 2022 (sebelumnya) sebesar 3,88%;
- Capaian IKK 2.2 tahun 2023 jika dibandingkan terhadap target jangka menengah (renstra), maka capaian ini telah mencapai 103,42%.



IKK 1.1	2022	2023	Target Renstra
TARGET	85	92	92
REALISASI	91,59	95,15	-
%CAPAIAN	107,75	103,42	103,42

Akan tetapi, walaupun capaian 2023 telah berhasil melampaui target Renstra, dikarenakan NKA ini merupakan nilai kinerja tahun anggaran yang penilaiannya diukur secara tahunan, maka masih perlu disusun langkah dan strategi untuk mempertahankan capaian atas nilai ini. Faktor lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah dengan diterbitkannya PMK No 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yang mengatur beberapa perubahan aspek penilaian dan bobot komposit perhitungan NKA.



Faktor Keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini adalah:

- Komitmen bersama pimpinan dan seluruh pengelola keuangan di lingkungan Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelesaikan penugasan dalam mencapai target kinerja anggaran;
- Melakukan optimalisasi anggaran untuk pencapaian capaian output kegiatan;
- Merancang jadwal percepatan pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan prioritas nasional;
- Melakukan rapat evaluasi anggaran secara berkala.

Hal yang perlu dikaji lebih lanjut adalah indikator yang ada pada penilaian IKPA, yaitu indikator perencanaan halaman III DIPA, Realisasi Anggaran dan Pengelolaan UP, serta belanja kontaktual yang belum mencapai nilai optimal. Pengelolaan UP/TUP tercatat 2 kali terlambat melakukan revolving/pertanggungjawaba UP/TUP, dan 2 kali terlambat melakukan pertanggungjawaban TUP, selain itu revolving UP tidak penuh atau dibawah 95% dari nilai UP. Deviasi antara realisasi SP2D dan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA masih tinggi disebabkan salah satunya terlambatnya pertanggungjawaban TUP yang sudah dijadwalkan. Hal ini dikarenakan proses pertanggungjawaban keuangan kegiatan yang belum bisa mengimbangi tingginya volume pelaksanaan kegiatan. Faktor lainnya adalah terbatasnya jumlah SDM BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya indikator belanja kontraktual, terdapat keterlambatan pendaftaran kontrak dan tidak melakukan akselerasi belanja modal. Kedepannya, BGP Provinsi Kalimantan Selatan agar meningkatkan manajemen waktu dan SDM dalam pengelolaan anggaran dan kegiatan. BGP Provinsi Kalimantan Selatan juga harus memperhatikan kriteria penilaian kinerja pelaksanaan anggaran agar dapat menyusun strategi mengoptimalkan nilai IKPA.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Kegiatan-kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- Kasubbag dan tim keuangan melaksanakan rekomendasi pimpinan terkait dengan pembagian tugas kepanitiaan yang jelas terutama untuk petugas penyusunan SPJ Keuangan;
- Kasubbag dan tim Keuangan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala dan intensif atas pelaksanaan kinerja anggaran terutama untuk indikator-indikator IKPA dan EKA yang belum optimal, terutama terkait dengan pengelolaan dana up/tup dan deviasi halaman III DIPA;
- Menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan kinerja anggaran agar indikator-indikator IKPA yang belum optimal bisa ditingkatkan;
- Tim Keuangan mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Kalsel triwulan IV;
- Tim Keuangan mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Kalsel;
- Studi tiru pengelolaan anggaran di BGP Provinsi Bali.

KENDALA DAN PERMASALAHAN

Beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi oleh BGP Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan implementasi sistem akuntabilitas kinerja selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- Aktivitas pertanggungjawaban keuangan belum bisa mengimbangi volume pelaksanaan kegiatan yang tinggi, sehingga menyebabkan beberapa rencana penarikan dana yang telah dijadwalkan tidak bisa direalisasikan tepat waktu;
- Perbedaan persepsi terkait dengan klaim capaian *output* antara tim kerja terkait dan tim perencanaan, serta data capaian *output* yang belum terorganisasi dengan baik;
- Penyerapan anggaran yang jauh dari pola ideal dan cenderung tidak proporsional dan menumpuk di akhir tahun;
- Persepsi penyerapan anggaran yang tinggi dengan tanpa memperhatikan pencapaian *output* kegiatan masih dianggap keharusan.

LANGKAH ANTISIPASI DAN STRATEGI

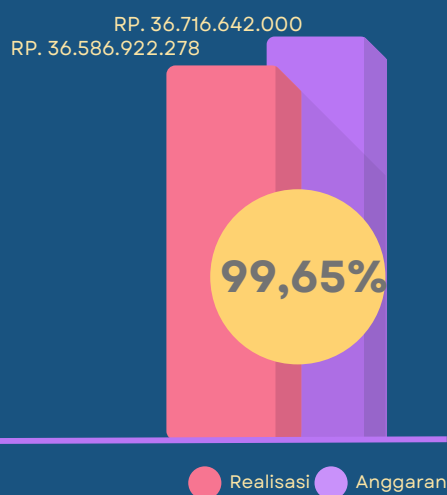
Untuk mengatasi kendala/permasalahan yang dihadapi, BGP Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan beberapa langkah antisipasi dan strategi sebagai berikut:

- Monitoring dan evaluasi secara berkala dan intensif terhadap konsistensi rencana/jadwal pelaksanaan kegiatan, agar penarikan dana sesuai dengan yang direncanakan;
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi proses administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- Penyamaan persepsi terkait dengan klaim capaian *output* kegiatan;
- Mengidentifikasi *output* kegiatan yang bisa dioptimalisasi dan membuat *database* capaian *output* kegiatan.

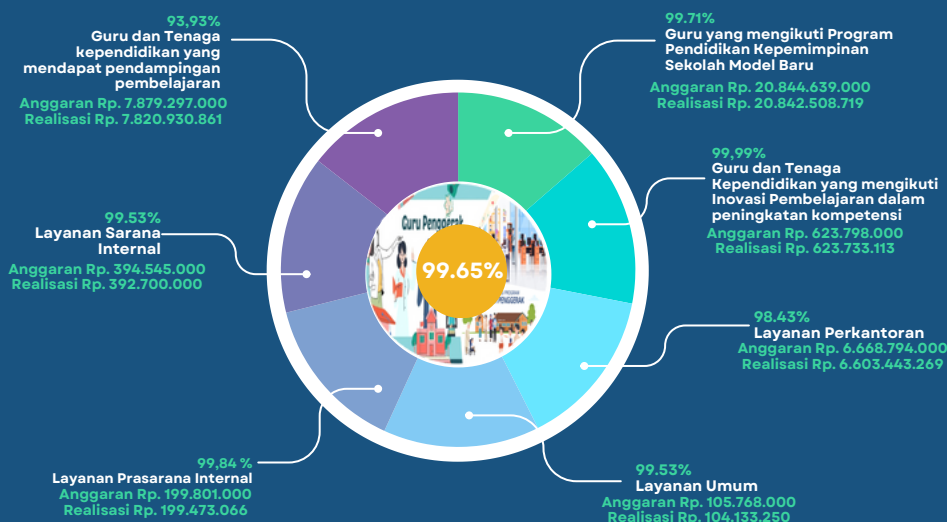


REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran 2023



Realisasi Anggaran Per Output



Pagu anggaran BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 36,716,642,000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 36,586,045,833,- dengan persentase sebesar 99,65%. Rincian per jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	BELANJA PEGAWAI	3.382.359.000	3.317.233.590	98,07
2	BELANJA BARANG	32.739.937.000	32.677.515.622	99,81
3	BELANJA MODAL	594.346.000	592.173.066	99,63
TOTAL		36.716.642.000	36.586.922.278	99,65

Pagu sebesar tersebut digunakan untuk mendanai pencapaian 2 (dua) sasaran kegiatan dengan 5 (lima) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan/indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan/indikator kinerja kegiatan.

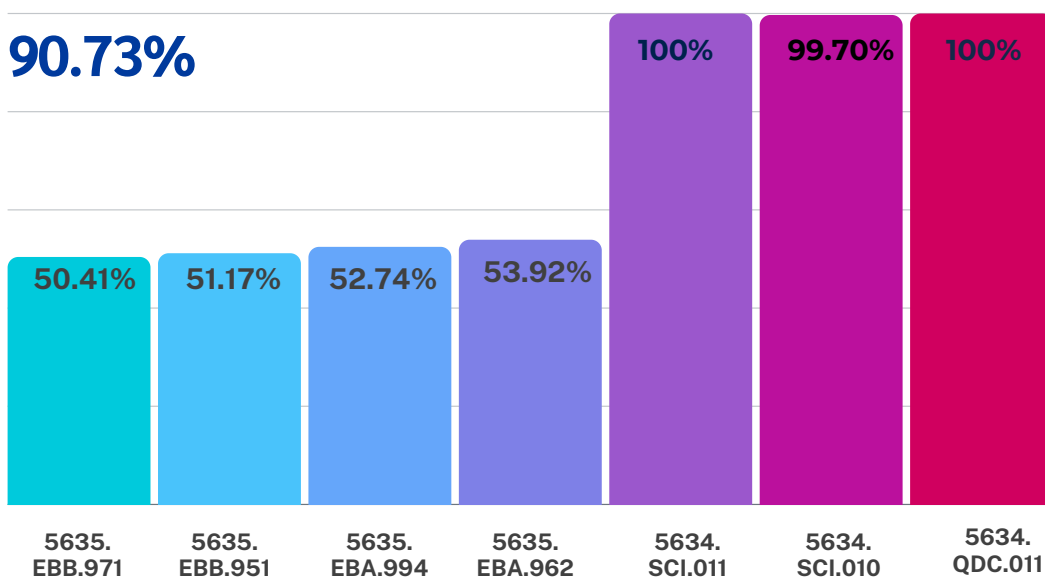
Nomenklatur	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran	Realisasi
SK	Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan		
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	7.879.297.000	7.820.930.861
IKK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	623.798.000	623.733.113
IKK	Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	20.844.639.000	20.842.508.719
SK	Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan		
IKK	Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	7.368.908.000	7.299.749.585
IKK	Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan		

EFISIENSI



NILAI EFISIENSI

90.73%



Capaian Output

Realisasi Anggaran

Efisiensi Anggaran

108.90%

99.65%

16.29%

Sesuai dengan PMK Nomor: PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga, maka pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran output dengan capaian output dan realisasi anggaran output dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran output dengan capaian output. Selanjutnya, agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, maka perlu ditransformasi dengan rumus sebagai berikut.

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi.

Kode Output	Nama Output	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Output Kegiatan (%)	Efisiensi (N)(%)	Nilai Efisiensi (NE) (%)	Kategori
5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan					
5634.QDC.011	Guru dan tenaga kependidikan yang mendapat pendampingan pembelajaran	99,26%	119,86%	20,75%	100,00%	Sangat Efisien
5634.SCI.010	Guru yang mengikuti Program Pendidikan Kepemimpinan Sekolah Model Baru	99,99%	119,87%	19,88%	99,70%	Sangat Efisien
5634.SCI.011	Guru dan Tenaga Kependidikan yang mengikuti Inovasi Pembelajaran dalam peningkatan kompetensi	99,99%	120,00%	20,01%	100,00%	Sangat Efisien
5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan					
5635.EBA.962	Layanan Umum	98,45%	100,00%	1,57%	53,92%	Kurang Efisien
5635.EBA.994	Layanan Perkantoran	99,02%	100,00%	0,99%	52,47%	Kurang Efisien
5635.EBB.951	Layanan Sarana Internal	99,53%	100,00%	0,47%	51,17%	Kurang Efisien
5635.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	99,84%	100,00%	0,16%	50,41%	Kurang Efisien
Total		99,65%	108,90%	16,29%	90,73%	Sangat Efisien

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian output kegiatan, efisiensi, dan nilai efisiensi masing-masing keluaran bervariasi. Nilai efisiensi dengan kategori “Sangat Efisien” terdapat pada semua output kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan”. Hal ini karena pada *output* tersebut terjadi optimalisasi peningkatan jumlah kegiatan yang dilakukan dibanding jumlah kegiatan yang direncanakan sebelumnya, namun tidak menambah alokasi anggaran bahkan mengurangi alokasi anggaran, serta capaian jumlah guru dan tenaga kependidikan meningkat dengan penggunaan anggaran secara efisien bahkan tanpa anggaran, karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan dilaksanakan secara daring.

Nilai efisiensi dengan kategori “Kurang Efisien” terjadi pada semua *output* kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan”. Hal ini karena pada kegiatan ini, meskipun diperoleh capaian *output* kegiatan 100%, namun realisasi anggaran cukup tinggi masing-masing 98.45%, 99.02%, 99.53%, dan 99.84%. *Kegiatan ini juga merupakan kegiatan layanan dengan output generik yang secara perencanaan anggarannya tidak bisa dilakukan efisiensi seperti belanja gaji pegawai.*

INOVASI, PENGHARGAAN, PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

INOVASI

SIMBAKULA

Sistem Informasi Manajemen Bangun Akuntabilitas Kinerja Untuk Layanan (SIMBAKULA) merupakan aplikasi inovasi yang dibangun dan dimanfaatkan oleh internal Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal memproses data dan informasi yang dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan penyajian data pelaksanaan kegiatan di Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan yang bersifat terintegrasi.



Dalam upaya peningkatan kualitas pembayaran uang perjalanan dinas peserta pendidikan dan pelatihan, BGP Provinsi Kalimantan Selatan membuat aplikasi sederhana yang dapat memudahkan petugas BGP dalam membuat administrasi keuangan peserta.

SAAT INI 64

CETAK

No 64 s.d 64

64

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengawas, Penilik, dan Kepala Sekolah dalam Pendampingan dan Kepemimpinan Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka di Lingkungan Pemerintah Kab HST

Rincian penerimaan:

- Uang Transport	Rp	150.000
- Uang Harian Fullboard (4 hari x Rp 130.000)	Rp	95.000
		+
Jumlah yang diterima	Rp	245.000

PENGHARGAAN

Selama tahun 2023, BGP Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan satu penghargaan sebagai berikut.



**Duta Merdeka Belajar
Kategori Dampak Pemangku
Kepentingan**

PROGRAM CROSSCUTTING/COLLABORATIVE

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BGP Provinsi Kalimantan selatan melakukan beberapa bentuk kerjasama dengan dinas/instansi daerah. Berikut merupakan perjanjian kerja sama dalam peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang berada dalam wilayah kerja.

1. Kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi literasi dan numerasi guru di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2023



SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
 Nomor : 420/907.B.GTKBUD/DIK/2023



DAN

BALAI GURU PENGGERAK KALIMANTAN SELATAN
 Nomor : 1083/B/7.19/GT.02.02/2023

TENTANG
KEGIATAN PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI LITERASI DAN NUMERASI GURU
DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. Muhammad Anhar, S.STP, ME**
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah
 Alamat : Jalan H. Sibli Imansyah No. 1 Barabai
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kab. Hulu Sungai Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dr. Abdul Kamil Marisi, MPd**
 Jabatan : Kepala Balai Guru Penggerak
 Alamat : Jl. Ambuhung, Loktabat, Banjarbaru, Kalimantan Selatan
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi Guru Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. **Pihak Pertama** menyediakan biaya, menyiapkan waktu, dan calon peserta diklat;
2. **Pihak Kedua** menyediakan narasumber, akomodasi peserta, konsumsi selama diklat, dan tempat sesuai dengan perumtukan program diklat;
3. **Pihak Kedua** memberikan sertifikat kepada setiap peserta diklat yang telah memenuhi syarat ketercapaian/kelulusan sesuai standar yang ditetapkan dari **Pihak Kedua**.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi Guru Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dalam pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi bagi pendidik PAUD Kabupaten Kotabaru tahun 2023 dan pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi pelatihan matematika bagi guru sekolah dasar di lingkungan Disdikbud Kabupaten Kotabaru



bgp Kalimantan
Selatan
Balai Guru Penggerak

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
DENGAN
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR:
NOMOR: 1554/B7.19/KS.00.00/2023

**TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI PENDIDIK PAUD
TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis, tanggal lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BGP Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Selamat Riyadi, S Pd., M.Ed | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd | Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Bab III Pasal 8 bahwa salah satu fungsi BGP adalah pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
- DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru tahun 2023

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- Maksud dari Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dalam penyelenggaraan program Peningkatan Kompetensi bagi Pendidik PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru.



bgp Kalimantan
Selatan
Balai Guru Penggerak

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
DENGAN
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR:
NOMOR:/B7.19/KS.00.00/2023

**TENTANG
PELATIHAN MATEMATIKA BAGI GURU SEKOLAH DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2023**

Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di BGP Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Selamat Riyadi, S Pd., M.Ed | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd | Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak, Bab III Pasal 8 bahwa salah satu fungsi BGP adalah pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
- DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru tahun 2023

3. Kemitraan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pelaksanaan diklat peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2023



b-g-p Kalimantan
Balai Guru Penggerak

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DENGAN
BALAI GURU PENGGERAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 400.3.5.3/1562/ DESDIKBUD
NOMORI: 06.00 / 3.1 - 10 / 6.5 - 00.00 / 2023

**TENTANG
PELATIHAN PENINGKATAN KOMPETENSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Tahun 2023**

Pada hari ini *Sesue*, tanggal *Lima Belas* bulan *Mei* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga*, bertempat di BGP Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Jumadi, S.AP., MT | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA . |
| 2. Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd | Kepala Balai Guru Penggerak
Provinsi Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana di atas, sepakat dan menyetujui bersama-sama untuk mengikat diri dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini, atas dasar saling menghormati, dengan persyaratan dan ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
DASAR KERJASAMA**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak
- Pasal 4 (h) bahwa fungsi BGP adalah pelaksanaan kemitraan di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
- DIPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2023

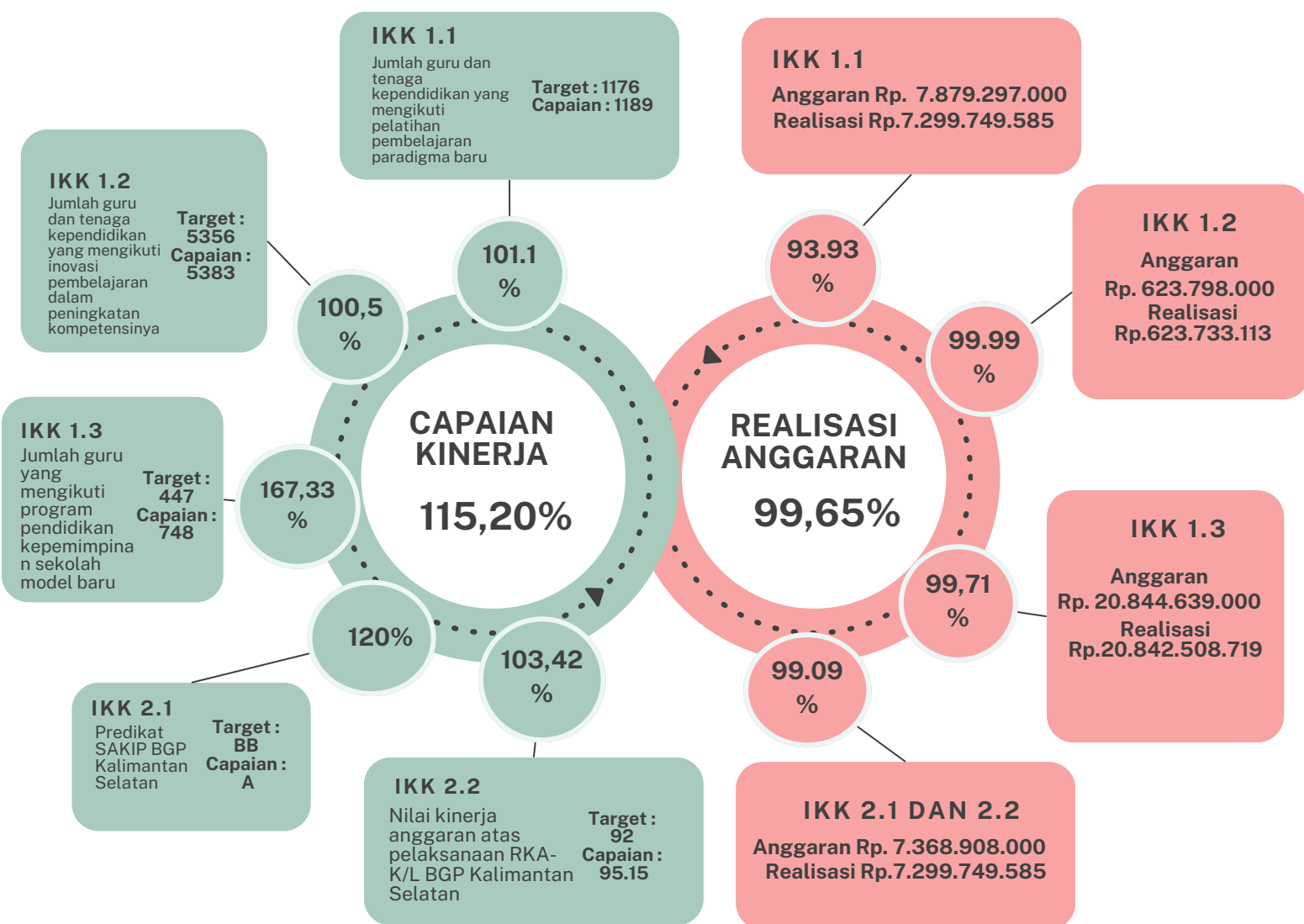
**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

PENUTUP

- Kesimpulan

KESIMPULAN

Selama tahun 2023, BGP Provinsi Kalimantan Selatan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Pagu anggaran BGP Provinsi Kalimantan Selatan pada DIPA tahun 2023 sebesar Rp. 36,716,642,000,-. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 36,586,045,833,- dengan persentase sebesar 99,65%. Hasil perhitungan nilai efisiensi untuk semua output kegiatan “Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan” masuk dalam kategori “Sangat Efisien” dengan nilai masing-masing output 100%, 99,70%, 100%. Nilai efisien semua output kegiatan “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan” masuk dalam kategori “Kurang Efisien” dengan nilai masing-masing output adalah 53,92%, 52,47%, 51,17%, 50,41%. Namun, untuk nilai efisiensi keseluruhan anggaran adalah sebesar 90,73% dengan kategori “Sangat Efisien”.

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Dalam pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), masih terdapat beberapa keluhan dari sekolah penggerak terhadap fasilitator terkait pendampingan dokumen kurikulum merdeka;
2. Dalam pelaksanaan Program Guru Penggerak (PGP), masih terdapat beberapa pengajar praktik belum berpatokan pada moderasi dalam melaksanakan Pendampingan Individu (PI) dan kelompok (Lokakarya). Beberapa fasilitator mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan materi modul pembelajaran dan rendahnya penguasaan IT (LMS) berimbas pada penghitungan *time spent*;
3. Penerapan metode *at cost* dalam pembayaran transpor peserta/fasilitator/pengajar praktik di beberapa kabupaten/kota masih menjadi kendala dalam pemenuhan bukti pengeluaran dikarenakan bukti pengeluaran tidak tersedia;
4. Proses pertanggungjawaban keuangan kegiatan belum dapat mengimbangi tingginya volume pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan terlambatnya pencairan dan pembayaran, pelaporan, serta penarikan dana/realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan.
5. Mutasi pegawai (*widyaprada*) sebanyak 16 orang ke BPMP Provinsi Kalimantan Selatan sedikit banyak mempengaruhi ritme pelaksanaan kegiatan BGP Provinsi Kalimantan Selatan.



Langkah kerja kedepan dalam meningkatkan kinerja organisasi antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas/instansi daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja;
2. Mengoptimalkan pemetaan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan mengidentifikasi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan kompetensi mereka, sehingga dapat memberikan layanan pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan kebutuhan mereka;
3. Meningkatkan inovasi kerja pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk peningkatan kualitas, efektivitas dan efisiensi kerja dan layanan;
4. Melakukan konsultasi secara aktif dan intensif dengan unit eselon I terkait penyelesaian kendala/masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan;
5. Menyusun perencanaan program kegiatan yang matang termasuk penyusunan jadwal kegiatan dengan tetap memperhatikan pola penyerapan anggaran ideal;
6. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dengan mengagendakan rapat evaluasi rutin setiap 1 minggu di hari Senin;
7. Mengupayakan penambahan pegawai BGP Provinsi Kalimantan Selatan baik melalui usulan formasi CASN maupun melalui jalur mutasi pegawai dari instansi lain;
8. Penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya dalam rangka percepatan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA AWAL

PERJANJIAN KINERJA AKHIR

PENGUKURAN KINERJA

SURAT PERNYATAAN LAPORAN
KINERJA TELAH DIREVIU





Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan
Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Jabatan : Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarbaru, 24 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	1176
		[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
		[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	447
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	BB
		[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan	92

RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 38.355.134.000
2	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 6.927.837.000
		TOTAL	Rp. 45.282.971.000

Banjarbaru, 24 Januari 2023

Plt. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan
Dengan
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Jabatan : Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Jabatan : Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini,

dalam

rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Banjarbaru, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	1176
		[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	5356
		[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	447
2	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	BB
		[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	5635	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan	Rp. 7.368.908.000
2	5634	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp. 29.347.734.000
		TOTAL	Rp. 36.716.642.000

Banjarbaru, 12 Desember 2023

**Direktur Jenderal Guru dan Tenaga
Kependidikan,**



Prof. Dr. Nunuk Suryani M.Pd

Kepala BGP Provinsi Kalimantan Selatan,



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.



**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN IV
BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN s.d Bulan Desember Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRES CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Perjanjian Kinerja	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan
1	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.1] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru	Orang	1176	TW4 : 1176	TW4 : 1189
2	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.2] Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya	Orang	5356	TW4 : 5356	TW4 : 5383
3	[SK 1.0] Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan	[IKK 1.3] Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru	Orang	447	TW4 : 447	TW4 : 748
4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.1] Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan	Predikat	BB	TW4 : BB	TW4 : A
4	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan	[IKK 2.2] Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan	Nilai	92	TW4 : 92	TW4 : 95,15

2. HASIL ANALISIS CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

a). PENYERAPAN ANGGARAN

Pagu Anggaran sebesar **Rp.36.716.642.000** dan Realisasi Anggaran s.d. 17 Januari 2024 sebesar **Rp. 36.586.922.278** atau **99,65%** maka sisa realisasi penyerapan anggaran s.d. 17 Januari 2024 **Rp. 129.719.722**

b). ANALISIS TERKAIT PROGRES CAPAIAN KINERJA, PERMASALAHAN, DAN STRATEGI YANG DILAKUKAN

A . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- IKK 1.1 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan pembelajaran paradigma baru

Progress / Kegiatan :

PSP angkatan 1, 2 dan 3 sudah melaksanakan kegiatan pendampingan kelompok baik lokakarya Perencanaan berbasis data, refleksi Lokakarya, refleksi coaching pengawas sekolah, kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah dampingan, dan lokakarya disiplin positif.

Kendala / Permasalahan :

Kendala pada saat pendampingan

pengaturan waktu pendampingan oleh fasilitator karena padatnya agenda di masing masing FSP, pengawas sekolah tidak hadir pada saat pendampingan daring karena faktor jaringan, cuaca (hujan) dan sakit (dari laporan FSP).

Strategi / Tindak Lanjut :

Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan sekolah terkait

B . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- IKK 1.2 Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti inovasi pembelajaran dalam peningkatan kompetensinya

Progress / Kegiatan :

Jumlah guru dan kepala sekolah yang telah memahami Kurikulum Merdeka dalam melaksanakan IKM semakin bertambah. Kegiatan pemahaman pembelajaran implementasi kurikulum merdeka melalui belajar di PMM, IHT, bimtek, workshop baik yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, KKG, MGMP, IGTKI, maupun yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan. Target untuk menyelesaikan topik di PMM yang ditetapkan oleh pihak sekolah dan sebagian dinas pendidikan juga mendukung tercapainya pemahaman tersebut.

Kendala / Permasalahan :

1. Masih belum merata dan serius sebagian guru dalam mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM

2. Sebagian guru yang sudah mengikuti pelatihan mandiri melalui PMM belum menyelesaikan aksi nyata

3. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan kurikulum melalui jalur mandiri diperlukan monitoring dan evaluasi, tetapi masih belum terlaksana karena terkendala anggaran.

Strategi / Tindak Lanjut :

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

1. Menyampaikan kepada pimpinan terkait dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi
2. Melanjutkan penguatan kompetensi guru melalui pelatihan mandiri dengan menggunakan PMM.

C . SK 1.0 Meningkatnya kompetensi guru dan tenaga kependidikan

- IKK 1.3 Jumlah guru yang mengikuti program pendidikan kepemimpinan sekolah model baru

Progress / Kegiatan :

Program Guru Penggerak sudah meluluskan Angkatan 6 pada bulan Mei sejumlah 226 orang, Angkatan 7 pada bulan Agustus sejumlah 217 orang dan Angkatan 8 sejumlah 289 orang. Untuk angkatan 9 pelaksanaan PGP telah selesai melaksanakan Pendampingan Individu dan Lokakarya 3. Pada setiap pelaksanaan Pendampingan Individu dan Lokakarya selalu dimonitoring dan evaluasi (monev) oleh petugas dari BGP Provinsi Kalimantan Selatan.

Kendala / Permasalahan :

1. Beberapa Pengajar Praktik dalam melaksanakan Pendampingan Individu dan Lokakarya tidak sesuai dengan moderasi/panduan
2. Ada beberapa fasilitator yang kurang menguasai substansi materi dan kompetensi bidang IT
 3. Pada beberapa daerah di Kab/Kota Pengajar Praktik mengalami kesulitan dalam melampirkan bukti perjalanan yang di bayar secara at cost
4. Beberapa Fasilitator dan Pengajar Praktik tidak segera mengisi nilai pada LMS setelah tugas/kegiatan selesai dilaksanakan.

Strategi / Tindak Lanjut :

1. Penanggungjawab PGP memberikan teguran langsung terhadap Pengajar Praktik yang tidak melaksanakan Pendampingan Individu dan Lokakarya sesuai moderasi
2. Penanggungjawab PGP memberikan teguran terhadap fasilitator agar meningkatkan kompetensi baik penguasaan substansi materi maupun bidang IT
3. Melampirkan Surat Pertanggungjawabn Mutlak (SPTJM) sebagai bukti untuk pembayaran
4. Penanggungjawab PGP memberikan teguran terhadap fasilitator dan pengajar praktik agar segera mengisi penilaian di LMS tepat waktu.

D . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan

- IKK 2.1 Predikat SAKIP BGP Kalimantan Selatan

Progress / Kegiatan :

- Kegiatan yang telah dilaksanakan selama triwulan IV dalam rangka penguatan AKIP BGP Provinsi Kalsel adalah sebagai berikut:
1. Rapat evaluasi dan pengukuran capaian kinerja triwulan III
 2. Rapat evaluasi dan pengukuran capaian kinerja triwulan IV
 3. Studi banding terkait dengan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian IKK
 4. Peningkatan kompetensi SDM tim SAKIP dengan penugasan mengikuti diklat SAKIP dan sosialisasi terkait dengan AKIP
 5. Penyusunan draft laporan kinerja 2023.

Kendala / Permasalahan :

Data kinerja belum dikelola dengan baik, sehingga dalam penyusunan draft laporan kinerja agak terhambat.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengumpulkan seluruh data kinerja selama tahun 2023 dan membuat database kinerja.

E . SK 2.0 Meningkatnya tata kelola BGP Provinsi Kalimantan Selatan

- IKK 2.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L BGP Kalimantan Selatan

Progress / Kegiatan :

- Sebagai upaya mengoptimalkan nilai NKA, BGP Provinsi Kalsel pada triwulan IV telah melakukan beberapa kegiatan berikut ini :
1. Melaksanakan rekomendasi pimpinan terkait dengan pembagian tugas kepanitiaan yang jelas terutama untuk petugas penyusunan SPJ Keuangan
 2. Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan intensif atas pelaksanaan kinerja anggaran terutama untuk indikator-indikator IKPA dan EKA yang belum optimal, terutama terkait dengan pengelolaan dana up/tup dan deviasi halaman III DIPA
 3. Menyusun langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan kinerja anggaran agar indikator-indikator IKPA yang belum optimal bisa ditingkatkan
 4. Mengikuti kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb Kalsel triwulan IV.

Kendala / Permasalahan :

Upaya perbaikan/percepatan realisasi anggaran sudah dilakukan namun belum optimal, sehingga pola pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan terutama di pengelolaan uang persediaan masih terlambat dari jadwal yang seharusnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengoptimalkan nilai indikator-indikator IKPA dan EKA yang masih ditingkatkan, terutama indikator efisiensi dengan mengidentifikasi hasil kegiatan yang bisa diklaim sebagai capaian output.

3. REKOMENDASI PIMPINAN

1. Kedepannya agar subbagian umum dan setiap tim kerja membuat inovasi kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas output
2. Agar setiap tim kerja menyusun rencana pelaksanaan/pejadwalan kegiatan tahun 2024 secara matang dan dengan memperhatikan pola ideal penyerapan anggaran
3. Agar pengelolaan keuangan terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai kewajiban biaya transpor peserta atcost dapat dikoordinasikan

dan disepakati bersama dengan dinas pendidikan setiap kabupaten/kota.

Demikian laporan pengukuran kinerja triwulan IV tahun 2023 untuk dimanfaatkan dalam rangka perbaikan kinerja periode selanjutnya.

Banjarbaru, 17 Januari 2024

**Kepala BGP Provinsi Kalimantan
Selatan**



Dr. Abdul Kamil Marisi, M.Pd.

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu laporan kinerja BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN untuk tahun anggaran 2023 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BGP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Banjarbaru, 26 Januari 2024

Ketua Tim Reviu



Rahmawati Ardiyan, A.L., S.E., Ak.
198109192008122001